

Nama : Lis Tiara Putri

NPM : 2213031001

## **Analisis Kasus: Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya**

### **1. Analisis Struktur Pengeluaran**

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum dapat dikatakan efisien karena sebagian besar anggaran, yaitu **68%**, masih digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Meskipun kesejahteraan guru penting untuk menjaga motivasi kerja, proporsi yang terlalu besar menyebabkan ruang fiskal untuk peningkatan mutu pendidikan menjadi sangat terbatas. Hal ini terlihat dari rendahnya skor literasi dan numerasi siswa, tingginya kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta terbatasnya infrastruktur digital.

Realokasi anggaran perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan hak guru, tetapi mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai agar dana dapat dialihkan ke sektor yang lebih berdampak terhadap kualitas pembelajaran. Alokasi infrastruktur sebaiknya ditingkatkan dari **12% menjadi sekitar 18–20%**, terutama untuk pembangunan jaringan internet, laboratorium komputer, dan perangkat pembelajaran digital di daerah terpencil. Program bantuan siswa juga perlu ditingkatkan dari **8% menjadi sekitar 12–15%** agar akses pendidikan bagi siswa kurang mampu semakin merata. Sementara itu, anggaran administrasi dapat ditekan melalui digitalisasi sistem pengelolaan sehingga lebih banyak dana dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan.

### **2. Analisis Sumber Pembiayaan**

Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih sangat bergantung pada pemerintah daerah sehingga fleksibilitas pembiayaan menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pendanaan melalui keterlibatan sektor swasta dan berbagai skema pembiayaan alternatif.

Model yang dapat diterapkan antara lain **Public-Private Partnership (PPP)** untuk pembangunan infrastruktur sekolah dan penyediaan teknologi pendidikan, program **Corporate Social Responsibility (CSR)** perusahaan bagi pengadaan beasiswa, laboratorium, dan fasilitas digital, serta kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah dalam pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan dana hibah dari lembaga internasional untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pendidikan.

### **3. Perbandingan dengan Negara OECD**

Beberapa praktik negara OECD yang realistis untuk diadopsi di Indonesia adalah **performance-based budgeting**, yaitu pengalokasian anggaran berdasarkan pencapaian kinerja sekolah; **student needs-based funding**, yaitu pendanaan yang mempertimbangkan kebutuhan siswa dan kondisi wilayah; peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan; serta penggunaan sistem evaluasi berbasis data sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi beberapa tantangan, seperti kesenjangan kapasitas pemerintah daerah, kualitas data pendidikan yang belum sepenuhnya akurat, keterbatasan infrastruktur digital terutama di daerah terpencil, serta potensi resistensi dari berbagai pihak terhadap perubahan sistem penganggaran. Oleh karena itu, reformasi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperkuat sistem informasi pendidikan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan membangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

#### **4. Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan (2026–2030)**

Selama lima tahun ke depan, reformasi pembiayaan pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui empat strategi utama.

**Pertama, perubahan struktur belanja.** Proporsi belanja pegawai secara bertahap dikurangi menjadi sekitar **60%** melalui pemerataan distribusi guru dan pengendalian penambahan tenaga pendidik. Anggaran infrastruktur ditingkatkan menjadi **18%**, bantuan siswa menjadi **12%**, pengembangan kompetensi guru sebesar **7%**, digitalisasi sekolah **5%**, dan administrasi ditekan menjadi **8%** melalui penerapan sistem administrasi digital.

**Kedua, peningkatan kualitas guru.** Pemerintah menerapkan pelatihan profesional berkelanjutan, sistem sertifikasi berbasis kompetensi, pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, serta pemerataan distribusi guru menggunakan sistem pemetaan kebutuhan berbasis data.

**Ketiga, digitalisasi sekolah.** Seluruh sekolah secara bertahap dilengkapi akses internet, perangkat komputer, platform pembelajaran digital, perpustakaan elektronik, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan peserta didik sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih merata.

**Keempat, monitoring dan evaluasi.** Pemerintah membangun sistem pemantauan berbasis data yang mengukur capaian literasi, numerasi, pemerataan guru, pemanfaatan anggaran, dan perkembangan infrastruktur digital. Evaluasi dilakukan setiap semester menggunakan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI), sedangkan hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya melalui pendekatan **performance-based budgeting**.

#### **Kesimpulan**

Reformasi pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya perlu difokuskan pada peningkatan efisiensi belanja, diversifikasi sumber pembiayaan, pemerataan kualitas guru, penguatan digitalisasi sekolah, serta penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Dengan strategi tersebut, anggaran pendidikan tidak hanya habis untuk belanja rutin, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, pemerataan layanan, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara berkelanjutan.